



# LAPORAN KEGIATAN 2020

**KERJASAMA PEMBUATAN APLIKASI  
SISTEM INFORMASI KEMISKINAN (SIK) YANG TERINTEGRASI  
DENGAN SISTEM INFORMASI DESA (SID)  
SERTA LABORATORIUM PENGEMBANGAN METODOLOGI  
PENDATAAN WARGA MISKIN SECARA PARTISIPATIF  
DI KABUPATEN KARANGANYAR**

**LAPORAN KEGIATAN :**

**KERJASAMA PEMBUATAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEMISKINAN (SIK) YANG  
TERINTEGRASI DENGAN SISTEM INFORMASI DESA (SID) SERTA LABORATORIUM  
PENGEMBANGAN METODOLOGI PENDATAAN WARGA MISKIN SECARA  
PARTISIPATIF DI KABUPATEN KARANGANYAR**

**OLEH :**

**YAYASAN JALATERA KOTA SURAKARTA**

## I. PENDAHULUAN

Yayasan JALATERA yang di dukung Ford Foundation dan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk pembuatan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan (SIK) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Desa (SID) serta membuat laboratorium pengembangan metodologi pendataan warga miskin secara partisipatif. Kerjasama ini tertuang dalam Perjanjian Kerjasama No. 050/01.PKS/IX/2019 dan Memorandum of Understanding (MOU) No. 460/25/MOU/IX/2019

Adapun ruang lingkup kerjasama antara Yayasan JALATERA Kota Surakarta dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan metodologi pendataan berbasis keluarga miskin secara partisipatif untuk mengurangi tingkat kesalahan pendataan yang dilakukan Nasional dan melakukan kategorisasi kesejahteraan di 5 desa.
2. Melakukan Pilot project di 5 (lima) desa dalam 1 (satu) kecamatan untuk pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID). Salah satu fiturnya adalah mengintegrasikan SID dengan SIK Kabupaten, sehingga data bisa dilakukan up dating di tingkat desa berbasis web.
3. Pengembangan teknologi android untuk proses verifikasi indicator kemiskinan yang terintegrasi dengan Sistem informasi kemiskinan (SIK) dan Sistem Informasi Desa (SID).
4. Pengembangan Metodologi Participatory Poverty Assesment (PPA) berbasis spasial di 1 (Satu) desa, untuk membantu desa menemukan masalah-masalah di desa yang kemudian bisa dipakai sebagai dasar pembuatan RPJMDes.
5. Pembuatan aplikasi Sistem Informasi Kemiskinan (SIK) di tingkat Kabupaten berbasis web, yang akan mempermudah setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memperoleh informasi kebutuhan warga miskin baik untuk layanan jaminan sosial maupun layanan program. Sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas rapat-rapat yang dijalankan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) sebagai bagian dari upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.

Adapun yang melatarbelakangi kerjasama ini adalah hasil temuan pada waktu kerjasama Yayasan JALATERA dengan pemerintah Kota Surakarta, dimana beberapa persoalan data kemiskinan, strategi penanggulangan kemiskinan yang belum efektif dan belum banyak pihak melakukan kerja-kerja bersama sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Hal ini berdampak pada lambatnya

penurunan kemiskinan dan di tingkat masyarakat terjadi kecemburuan sosial. Adapun temuan yang di peroleh pada saat kerjasama dengan pemerintah Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

- Masih banyak data warga yang lebih miskin justru tidak masuk dalam data nasional.
- Tidak tepat sasaran Program karena kurang akurasi data.
- Tidak tepat program Karena lemahnya informasi kebutuhan masyarakat miskin.
- Tidak terdistribusinya data kemiskinan pada setiap stake holder pembangunan Kabupaten, sehingga masing-masing bekerja dengan data yang dimiliki masing-masing (Belum single data).

## **II. HASIL KEGIATAN**

Adapun hasil kegiatan yang sudah dijalankan antara Yayasan JALATERA dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, berdasarkan MOU dan PKS terdiri dari beberapa bagian kegiatan. Adapun hasil kegiatannya beserta kesimpulan dan rekomendasi untuk pemerintah kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

**Hasil 1 :**

**Efektifitas Metodologi Participatory Poverty  
Assesement (PPA) berbasis keluarga untuk  
menghasilkan data warga miskin yang lebih valid  
sesuai dengan kondisi masyarakat.**

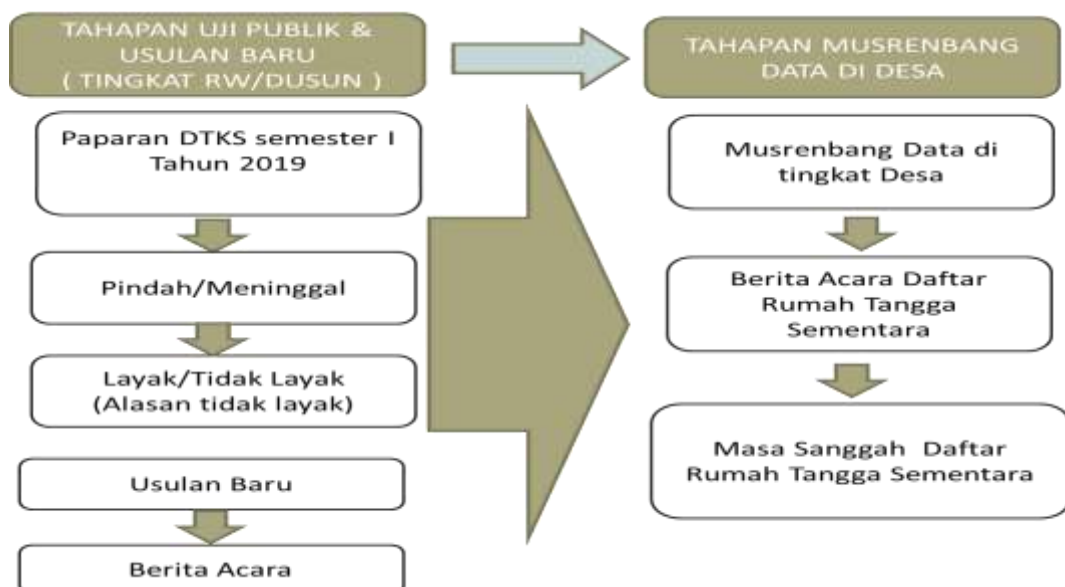
### A. Implementasi Metodologi Participatory Poverty Assessment (PPA) Berbasis Keluarga

Implementasi Metodologi Participatory Poverty Assessment (PPA) berbasis keluarga dilaksanakan di 5 desa di tiap Kabupaten secara berjenjang mulai uji publik di tingkat Rukun warga (RW) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) data di tingkat desa, mampu menghasilkan data yang presisi dengan kondisi riil masyarakat. Metodologi ini juga diuji berdasarkan peserta uji publik di tingkat RW dengan peserta kelompok Perempuan, Kelompok Laki-laki dan kelompok gabungan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini untuk menguji tingkat keakurasian data di masing-masing kelompok, hasil temuan akan menjadi bahan rekomendasi untuk menentukan jenis kelamin peserta uji publik ke depannya.

Adapun laboratorium untuk Pengembangan metodologi pendataan warga miskin dilaksanakan di 5 desa di kecamatan Mojogedang yaitu :

- a. Desa Pendem, dengan jumlah warga miskin sebesar 699 Rumah Tangga sasaran (RTS)
- b. Desa Munggur, dengan jumlah warga miskin sebesar 683 Rumah Tangga sasaran (RTS)
- c. Desa Pereng, dengan jumlah warga miskin sebesar 601 Rumah Tangga sasaran (RTS)
- d. Desa Gentungan, dengan jumlah warga miskin sebesar 519 Rumah Tangga sasaran (RTS)
- e. Desa Gebyok, dengan jumlah warga miskin sebesar 667 Rumah Tangga sasaran (RTS)

Total Data yang dilakukan proses pengujian tingkat validitas data sebanyak 3169 Rumah Tangga Sasaran (RTS) berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Semester I Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh kementerian Sosial Republik Indonesia. Adapun tahapan kegiatan yang dijalankan sebagai berikut :



Beberapa kesimpulan yang diperoleh dalam melakukan proses uji publik Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Semester I tahun 2019 baik dari sisi efektifitas penilaian warga miskin, menjangir warga miskin baru, peserta uji publik maupun basis wilayah yang digunakan. Adapun temuan-temuan pelaksanaan uji coba metodologi PPA berbasis keluarga yang dijalankan di 5 desa adalah sebagai berikut :

1. Efektifitas metodologi Participatory Poverty Assesment (PPA) berbasis keluarga untuk menyaring layak tidaknya warga miskin, Meninggal sebatangkara, dan pindah

**Tabel 1 :**  
**Rekapitulasi Hasil Uji Publik Berjenjang**  
**Data Tingkat Kesejahteraan Sosial (DTKS) Semester I Tahun 2019**  
**Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar**

Uraian	Pereng	Gentungan	Gebyok	Pendem	Munggur	Jumlah	Prosentase
<b>Jumlah Data PBDT</b>	<b>601</b>	<b>519</b>	<b>667</b>	<b>699</b>	<b>683</b>	<b>3169</b>	
Koreksi Tidak Layak Uji Publik RW	120	92	182	80	212	<b>686</b>	
Prosentase	19,97	17,73	27,29	11,44	31,04		<b>21,49 %</b>
Koreksi Pindah, Meninggal dll	63	22	53	38	34	<b>210</b>	
Prosentase	10,48	4,24	7,95	5,44	4,98		<b>6,62 %</b>
Koreksi Tidak Layak Musren Data	3	5	31	1	0	<b>40</b>	
Prosentase	0,50	0,96	4,65	0,14	0,00		<b>1,25 %</b>
<b>Jumlah Koreksi Masyarakat</b>	<b>186</b>	<b>119</b>	<b>266</b>	<b>119</b>	<b>246</b>	<b>936</b>	
<b>Prosentase Koreksi Masyarakat</b>	<b>30,95</b>	<b>22,93</b>	<b>39,88</b>	<b>17,02</b>	<b>36,02</b>		<b>29,36 %</b>
Koreksi Tidak Layak Versi Fasilitator Lokal (Faslok)	51	0	0	9	69	<b>129</b>	
Prosentase	8,49	0,00	0,00	1,29	10,10		<b>3,98 %</b>
<b>Jumlah Koreksi Faslok</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>69</b>	<b>129</b>	
<b>Prosentase Koreksi Faslok</b>	<b>8,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,29</b>	<b>10,10</b>	<b>19,88</b>	<b>3,98 %</b>
<b>TOTAL KOREKSI</b>	<b>237</b>	<b>119</b>	<b>266</b>	<b>128</b>	<b>315</b>	<b>1065</b>	
<b>PROSENTASE KOREKSI</b>	<b>39,43</b>	<b>22,93</b>	<b>39,88</b>	<b>18,31</b>	<b>46,12</b>		<b>33,33 %</b>
<b>SISA DATA DTKS</b>	<b>364</b>	<b>400</b>	<b>401</b>	<b>571</b>	<b>368</b>	<b>2104</b>	

- a. Proses PPA dilakukan melalui uji publik berjenjang dimulai dari Rukun Warga (RW) dengan mengundang perwakilan warga miskin dan perwakilan masyarakat yang tidak miskin untuk menentukan layak tidaknya seseorang disebut miskin berdasarkan pengamatan harian mereka bagaimana keluarga tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. **Dari Total Data 5 desa, ditemukan 686 Rumah Tangga Sasaran (RTS) dinyatakan tidak layak Miskin atau sebesar 21,49 %.**
- b. Hasil uji publik di tingkat RW juga menemukan data warga miskin yang seharusnya sudah dikeluarkan dari DTKS karena **meninggal sebatang kara (Tidak ada Keturunan), pindah dan tidak ditemukan sebesar 210 Rumah Tangga Sasaran (RTS) atau sebesar 6,62 % dari total data yang ada.**
- c. Data warga miskin yang dinilai layak dalam proses uji publik di tingkat RW, secara berjenjang dibawa ke tingkat desa untuk dilakukan MUSRENBANG Data. Data sisa DTKS dilakukan penilaian layak tidaknya oleh peserta, dimana setiap utusan RW boleh melakukan koreksi RW yang lainnya. Adapun hasil musrenbang data, masih ada data yang dikoreksi yaitu sebanyak **40 RTS atau sebesar 1,25 % dari total data. Sehingga Total Koreksi Masyarakat secara berjenjang mampu menghasilkan ketidak validtan DTKS semester I tahun 2019 sebesar 936 RTS atau sebesar 29,36 %.**
- d. Dari proses hasil kelayakan di tingkat musrenbang data, Tim masih mencoba menyaring lagi menurut pemahaman fasilitator lokal yang direkrut oleh yayasan JALATERA untuk melakukan penilaian ulang atas hasil data Musrenbang. Pertimbangan ini hanya untuk melakukan cross chek apakah hasil PPA benar-benar bisa 100 % Valid dihasilkan di tingkat masyarakat atau masih ada koreksi atas kelayakan miskin tidaknya. **Adapun hasil koreksi versi fasilitator lokal (faslok) masih ditemukan sebanyak 129 RTS atau sebesar 3,98 %.** Data koreksi faslok didominasi dari desa pereng dan Munggur yang cukup signifikan jumlahnya. Adapun 3 desa lainnya yaitu Gentungan, Gebyok dan Pendem hasil uji publik masyarakat relatif tidak ada koreksi atau kecil sekali koreksinya.
- e. **KESIMPULAN 1 :**
- Metodologi Analisa Kemiskinan Partisipatif (AKP) berbasis keluarga yang dilakukan secara berjenjang Efektif mampu menyaring data berdasarkan kategorisasi kesejahteraan berdasarkan Pengamatan Masyarakat di Tingkat RW atau Dusun.
  - Musrenbang Data di Tingkat Desa mampu menyaring ulang atas kelayakan dari hasil uji public RW/Dusun.



2. Efektifitas metodologi Participatory Poverty Assesment (PPA) berbasis keluarga Dilihat dari validitas usulan baru warga miskin yang belum terdata di DTKS.

**Tabel 2**  
**Rekapitulasi Hasil Uji Publik Berjenjang**  
**Data Usulan Baru Warga Miskin Yang Belum Tercantum Dalam DTKS Semester 1 2019**  
**Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar**

Uraian	Pereng	Gentungan	Gebyok	Pendem	Munggur	Jumlah	Prosentase
<b>Jumlah Data PBDT</b>	601	519	667	699	683	3169	
Jumlah Usulan Baru Uji Publik RW	148	257	200	141	203	949	
Prosentase	24,63	49,52	29,99	20,17	29,72		30,80 %
Jumlah Usulan Baru Musrenbang	78	15	40	4	16	153	
Prosentase	12,98	2,89	6,00	0,57	2,34		4,83 %
<b>Jumlah Usulan Baru</b>	<b>226</b>	<b>272</b>	<b>240</b>	<b>145</b>	<b>219</b>	<b>1102</b>	
<b>Prosentase Usulan Baru</b>	<b>37,60</b>	<b>52,41</b>	<b>35,98</b>	<b>20,74</b>	<b>32,06</b>		<b>35,63 %</b>
Koreksi Tidak Layak Musrenbang	3	11	6	8	0	28	
Prosentase	1,33	4,04	2,50	5,52	0,00		0,88 %
Koreksi Tidak Layak Versi Faslak	51	0	0	17	58	126	
Prosentase	22,57	0,00	0,00	11,72	26,48		3,98 %
<b>Jumlah Koreksi</b>	<b>54,00</b>	<b>11,00</b>	<b>6,00</b>	<b>25,00</b>	<b>58,00</b>	<b>154</b>	
<b>Prosentase Koreksi</b>	<b>23,89</b>	<b>4,04</b>	<b>2,50</b>	<b>17,24</b>	<b>26,48</b>		<b>4,86 %</b>
<b>Usulan Baru Layak</b>	<b>172</b>	<b>261</b>	<b>234</b>	<b>120</b>	<b>161</b>	<b>948</b>	
<b>Prosentase usulan Baru Layak</b>	<b>28,62</b>	<b>50,29</b>	<b>35,08</b>	<b>17,17</b>	<b>23,57</b>		<b>29,91 %</b>

- a. Proses PPA dilakukan melalui uji publik berjenjang dimulai dari Rukun Warga (RW) dengan mengundang perwakilan warga miskin dan perwakilan masyarakat yang tidak miskin untuk menentukan warga miskin baru berdasarkan pengamatan harian mereka bagaimana keluarga tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. **Dari Total Data 5 desa, ditemukan 948 Rumah Tangga Sasaran (RTS) dinyatakan Miskin tapi belum masuk dalam DTKS atau sebesar 29,91 %.**
- b. Data usulan warga miskin baru dan belum masuk DTKS di tingkat RW, secara berjenjang dibawa ke tingkat desa untuk dilakukan MUSRENBANG Data. Di dalam musrenbang menentukan 2 hal yaitu :
- Usulan Baru diluar usulan RW
- Jumlah usulan baru yang belum terdata di RW dan diusulkan di tingkat desa sebesar 153 RTS atau sebesar 4,83 %.

- Data Usulan warga miskin Baru Yang tidak layak miskin  
Dari jumlah usulan warga miskin Baru yang terkoreksi tidak layak miskin sebanyak 28 RTS atau sebesar 0,88 %
- c. Jadi Total usulan warga miskin baru versi masyarakat sebanyak sebanyak 1.074 RTS atau sebesar 33,89 %.
- d. Dari proses hasil kelayakan di tingkat musrenbang data, Tim masih mencoba menyaring lagi menurut pemahaman fasilitator lokal yang direkrut oleh yayasan JALATERA untuk melakukan penilaian ulang atas hasil data Musrenbang. Pertimbangan ini hanya untuk melakukan cross chek apakah hasil PPA benar-benar bisa 100 % Valid dihasilkan di tingkat masyarakat atau masih ada koreksi atas kelayakan miskin tidaknya. **Adapun hasil koreksi versi fasilitator lokal (faslok) masih ditemukan sebanyak 126 RTS atau sebesar 3,98 %.** Data koreksi faslok didominasi dari desa pereng dan Munggur yang cukup signifikan jumlahnya. Adapun 3 desa lainnya yaitu Gentungan, Gebyok dan Pendem hasil uji publik masyarakat relatif tidak ada koreksi atau kecil sekali koreksinya.
- e. **KESIMPULAN 2 :**
  - Metodologi Analisa Kemiskinan Partisipatif (AKP) berbasis keluarga yang dilakukan secara berjenjang Efektif mampu menemukan warga miskin baru yang belum terdata di DTKS berdasarkan kategorisasi kesejahteraan berdasarkan Pengamatan Masyarakat di Tingkat RW atau Dusun.
  - Musrenbang Data di Tingkat Desa mampu menghasilkan tambahan usulan baru, tetapi koreksi faslok juga cukup tinggi. Sehingga disarankan di dalam musrenbangdata tidak membuka usulan baru lagi.

3. Efektifitas metodologi Participatory Poverty Assesment (PPA) berbasis keluarga Dilihat dari jenis kelamin kepersetaan uji publik di tingkat RW/Dusun.

**Tabel 3**  
**DATA DTKS YANG TERKOREKSI**  
**Berdasarkan Metode Peserta AKP**

No	Metode Peserta	Koreksi Tidak Layak Uji Publik RW	%	Koreksi Pindah, Meninggal dll	%	Koreksi Tidak Layak Musren Data	%	Koreksi Tidak Layak Versi Faslok	%	Total Koreksi	Total %
1	Laki-Laki	241	19,10	74	5,86	9	0,71	42	3,33	366	29,00
2	Laki-Laki + Perempuan	195	19,27	82	8,10	21	2,08	31	3,06	329	32,51
3	Perempuan	250	27,93	54	6,03	10	1,12	16	1,79	330	36,87

**Kesimpulan 3 :**

Berdasarkan tabel di atas, koreksi data Terpadu kesejahteraan Sosial (DTKS) terkoreksi lebih banyak di kelompok ibu-ibu sebanyak 36 % dan dilihat dari tingkat efektivitas data relative kecil koreksi dari fasilitator lokal dibandingkan dengan kelompok laki-laki maupun kelompok campuran.

4. Efektifitas metodologi Participatory Poverty Assesment (PPA) berbasis keluarga Dilihat dari basis dasar wilayah pemetaan.

**Tabel 4 :**  
**DATA DTKS YANG TERKOREKSI**  
**Berdasarkan Metode Wilayah Pemetaan**

No	Metode Peserta	Koreksi Tidak Layak Uji Publik RW	%	Koreksi Pindah, Meninggal dll	%	Koreksi Tidak Layak Musren Data	%	Koreksi Tidak Layak Versi Faslok	%	Total Koreksi	Total %
1	Rukun Warga (RW)	314	24,40	70	5,44	5	0,39	5	0,39	394	30,61
2	Dusun	372	19,77	140	7,44	35	1,86	55	2,92	602	31,99

PPA berdasarkan basis wilayah peserta yang diundang dibagi ke dalam dusun dan Rukun Warga (RW) secara hasil total koreksi DTKS antara wilayah dusun maupun RW tidak jauh berbeda hasilnya, hal ini sangat terkait dengan pemahaman masyarakat atas kehidupan seseorang baik itu berkaitan dengan sumber penghasilan dan asset-asset produksi yang dimiliki.

#### **Kesimpulan 4 :**

Hasil koreksi PPA dengan basis wilayah dusun maupun RW persentasenya relatif hampir sama, tetapi melihat dari jumlah yang dikoreksi tidak layak oleh Fasilitator Lokal tingkat validitas lebih tinggi RW dibandingkan dusun.

### **REKOMENDASI**

#### **PENGUNAAN METODOLOGI PARTICIPATORY POVERTY ASSESEMENT (PPA) BERBASIS KELUARGA UNTUK MENDAPATKAN DATA WARGA MISKIN YANG VALID**

- 1. Metodologi PPA berbasis keluarga cukup efektif dalam melakukan koreksi kelayakan sebuah Rumah Tangga sasaran (RTS) untuk dikatakan “Miskin” baik yang sudah terdata di DTKS maupun usulan baru yang belum masuk dalam DTKS. Metodologi ini patut dikembangkan Dinas Sosial (DINSOS) Pemerintah Kabupaten dan direplikasikan ke desa-desa yang lain.**
- 2. Metodologi PPA, direkomendasikan memakai peserta dari kelompok perempuan sejak uji publik tingkat RW. Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun warga (RW) diundang sebagai peninjau, hal ini terkait dengan fungsi hirarki pemerintahan di kabupaten. Apabila di tiap desa ada mekanisme ada pertemuan PKK RW, mekanismenya bisa dijalankan pada saat rapat PKK RW sehingga bisa melakukan penghematan dari sisi biaya konsumsi.**
- 3. Berdasarkan basis wilayah, metodologi PPA direkomendasikan menggunakan basis wilayah RW.**
- 4. Hasil evaluasi dengan fasilitator lokal, merekomendasikan metodologi ini perlu ada penambahan teknik perangkingan antar warga miskin sesuai dengan pandangan setiap hari pola kehidupannya.**
- 5. Apabila pemerintah Kabupaten akan melaksanakan replikasi metodologi ini ke desa-desa yang lain, bisa menggunakan fasilitator lokal yang sudah dilatih dan sudah melakukan tahapan kegiatan uji publik. Adapun jumlah fasilitator yang dilatih sebanyak 25 orang atau setiap desa tersedia 5 orang fasilitator.**

**Hasil 2 :**

**Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi  
Kesejahteraan (SIK) di tingkat Kabupaten**

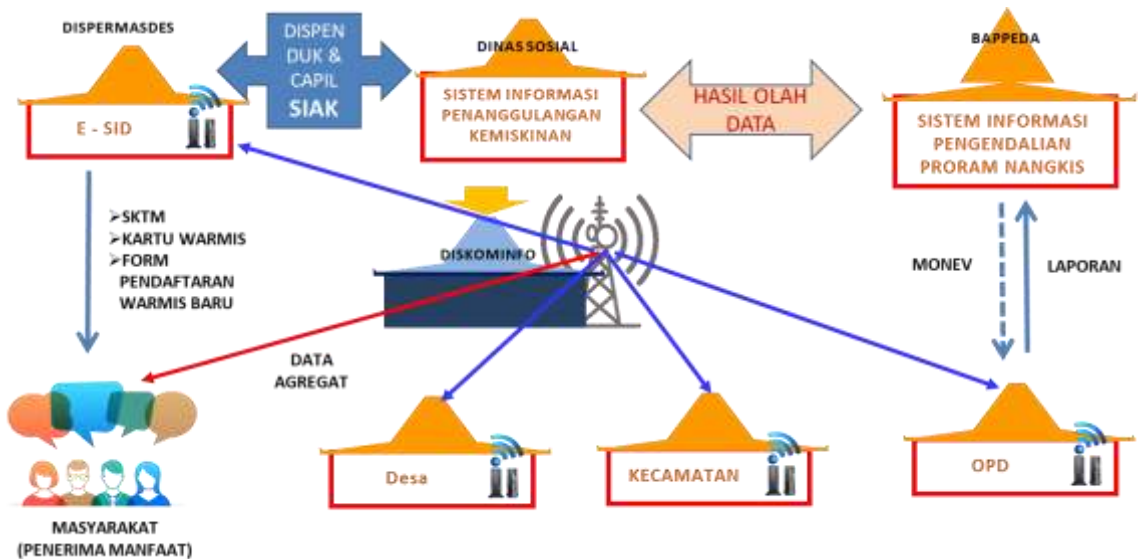
## **B. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan (SIK) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Desa (SID)**

Tidak terdistribusinya data kemiskinan ke seluruh stake holder pembangunan di Kabupaten baik itu pemerintah desa maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk di dalamnya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), berdampak pada lambatnya penurunan angka kemiskinan dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Lemahnya pengelolaan tata kelola data dan system informasi kemiskinan, berdampak pada kesalahan dalam mendiagnose kemiskinan. Hal ini mengakibatkan lemahnya perencanaan dan implementasi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh setiap stake holder pembangunan khususnya TKPKD dalam menentukan sasaran maupun menentukan jenis layanan program. Di sisi lain kebijakan implementasi UU No. 6 tahun 2014 tentang desa atas penggunaan Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) masih belum optimal penggunaannya dari sisi pro poor, pro growth dan pro job, hal ini ditandai dengan pembangunan desa masih terkonsentrasi pada pembangunan fisik. Problem mendasarnya adalah tidak tersedianya data kemiskinan di desa.

Ketersediaan data yang mudah diakses, akan mempermudah setiap OPD dan desa dalam menyusun arah kebijakan program yang akan dirancang tiap tahunnya untuk menentukan jenis layanan dan sasaran program. Selain itu, persolan perbedaan data tidak akan terjadi baik antara desa, kecamatan dan di tingkat Kabupaten karena data akan selalu sama. Dengan pola ini, kabupaten bisa menerapkan single data kesejahteraan untuk perencanaan pembangunan bagi setiap stake holder pembangunan.

Rancang bangun Aplikasi Sistem informasi Kesejahteraan (SIK) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Desa (SID) dibutuhkan team work di level Kabupaten dalam menyiapkan tata kelola data kemiskinan yang direncanakan. Adapun tim forum data meliputi : bapelbangda, Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermasdes). Adapun alamat aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan adalah : <https://sidanangkis.karanganyarkab.go.id/>

## 1. Model distribusi Data



Aplikasi saat ini sudah bisa digunakan oleh stake holder pembangunan, adapun data yang sudah terpasang adalah data Pembaharuan Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Semester I tahun 2019 yang dikeluarkan Kementerian Sosial. Beberapa Data DTKS baik tahun 2018, semester II tahun 2019 belum terpasang, karena belum tersedianya data dari DINSOS.

Secara aplikasi SIK sudah terkoneksi dengan data Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK), sehingga perubahan-perubahan terkait dengan data kependudukan sudah bisa langsung mengambil dari dispendukcapil.

### **Adapun kesimpulan dari rancang bangun SIK adalah sebagai berikut :**

- a. SIK mampu berintegrasi dengan Web service SIAK dengan baik.
- b. SIK sudah bisa diakses oleh OPD, Kecamatan maupun Desa. Dibutuhkan pengaturan hak akses oleh diskominfo.
- c. Di tingkat desa, SIK masih berdiri sendiri dan berfungsi sebagai Sistem Informasi Desa (SID). Hal ini karena belum jelasnya SID yang akan digunakan oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar, sehingga diharapkan fitur SIK bisa menjadi menu tambahan SID yang

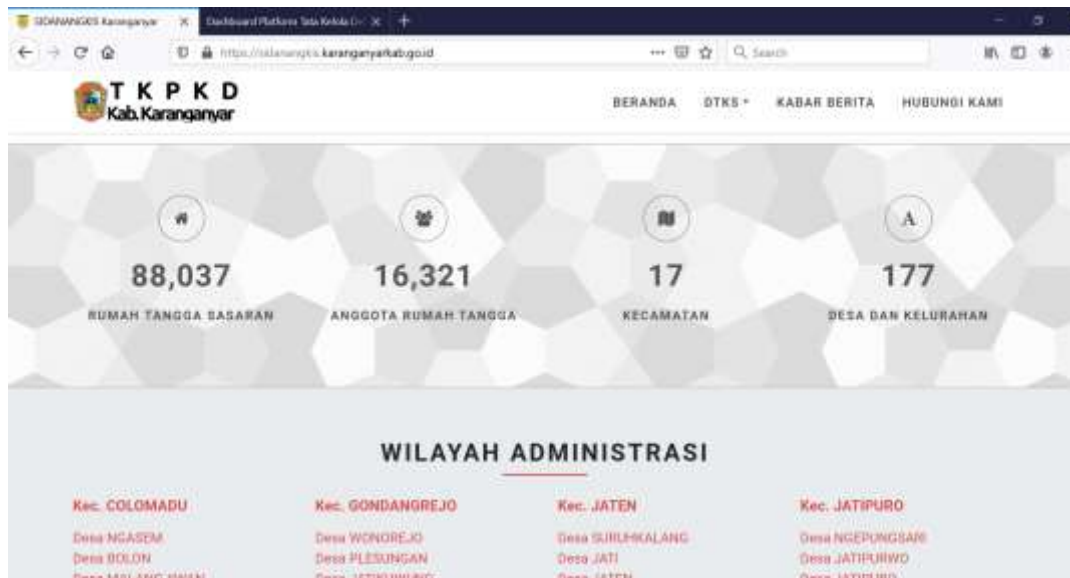
direncanakan. Dibutuhkan peran dispermades untuk mengambil keputusan, atas SID yang akan dikembangkan di Kabupaten Karanganyar.

- d. Data di dalam aplikasi sudah bisa di dorong ke OPD oleh Baperlitbang ataupun Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) sebagai baseline Perencanaan pembangunan tahunan. Meskipun dari hasil uji coba 5 desa yang sudah dijalankan, Data DTKS masih belum valid dengan Kondisi Lapangan. Dibutuhkan pelatihan bagi OPD, Desa dan Kecamatan dalam penggunaan aplikasi.

**2. Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan ( <https://sidanangkis.karanganyarkab.go.id/> )**

Aplikasi berbasis web selain untuk mempermudah distribusi data kesejahteraan kepada setiap stake holder pembangunan sebagai dasar menyusun perencanaan pembangunan, khususnya dalam menentukan kelompok sasaran dan jenis layanan. Diharapkan aplikasi juga mampu melakukan pengukuran dampak program, monitoring capaian kegiatan dan perkembangan tingkat kesejahteraan setiap individu warga miskin. Rancangan dalam membuat fitur-fitur di dalam aplikasi, harus mampu mempermudah setiap Stake holder pembangunan dalam membaca data dan menganalisa Data.

Adapun tampilan dashboard depan <https://sidanangkis.karanganyarkab.go.id/> adalah sebagai berikut :



Detail masing-masing fitur dari dashboard yang dikembangkan, memiliki fungsi diantaranya adalah :

- a. Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan





### 1. Wilayah Administratif

Fitur wilayah administratis berisi tentang wilayah-wilayah karanganyar mulai dari kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun, RW, RT yang berisi jumlah warga miskin di masing-masing level baik itu desil 1,2,3,4,5.

### 2. Data Indikator Rumah Tangga

Fitur ini berisi indikator-indikator kemiskinan berdasarkan kebutuhan rumah tangga sasaran (RTS), data ditampilkan jumlah setiap indikator per periode waktu pendataan.

### 3. Data Indikator Individu

Fitur ini berisi indikator-indikator kemiskinan berdasarkan kebutuhan Anggota Rumah Tangga (ART), data ditampilkan jumlah setiap indikator per periode waktu pendataan.

### 4. Query Data RTS

Fitur ini dipakai untuk menganalisa gabungan indikator dari indikator Rumah Tangga sasaran, dimana terkadang untuk menentukan sasaran penerima manfaat dibutuhkan indikator tambahan. Dengan model ini, setiap calon penerima manfaat yang memenuhi syarat akan disaring oleh aplikasi.

### 5. Query Data ART

Fitur ini dipakai untuk menganalisa gabungan indikator dari indikator Anggota Rumah Tangga (ART), dimana terkadang untuk menentukan sasaran penerima manfaat dibutuhkan indikator tambahan. Dengan model ini, setiap calon penerima manfaat yang memenuhi syarat akan disaring oleh aplikasi.

**b. Fitur Kantong-kantong Kemiskinan (Wilayah Administrasi)**

Fitur ini akan mempermudah pengambil kebijakan untuk menentukan wilayah-wilayah yang akan menjadi sasaran percepatan penanggulangan kemiskinan, dimana kantong kemiskinan harusnya menjadi prioritas utama menjadi lokasi intervensi. Dalam fitur ini data dibagi ke dalam Wilayah secara berjenjang mulai dari Kecamatan, Desa, Dusun, RW, RT dan di setiap jenjang bisa langsung dibuka by name by address baik RTS miskin maupun Individu anggota Rumah Tangga (ART) dari RTS serta dibagi berdasarkan tingkat keparahan kemiskinan (Desil 1, 2, 3, 4 dan 5).

Adapun tampilan Fitur kantong kemiskinan adalah sebagai berikut :

Data Periode PBOT 2020 Sem I													
#	Wilayah	Desil 1		Desil 2		Desil 3		Desil 4		Desil 5		TOTAL	
		1	Kecamatan COLMADO	601	1,118	1,246	1,170	950	3,041	466	1,052	1,138	4,419
2	Kecamatan GONDONGREJIS	1,088	6,674	2,818	7,288	1,928	5,034	708	2,452	1,072	4,320	6,352	26,241
3	Kecamatan IPTY	795	1,398	1,271	1,812	1,181	3,272	111	1,624	362	1,472	4,588	14,822
4	Kecamatan JEPARA	1,272											
5	Kecamatan JATOSO	1,106											
6	Kecamatan JIYANO	1,294											
7	Kecamatan JAWITONO	1,124											
8	Kecamatan JONGGALU	1,721											

Data Periode PBOT 2020 Sem I													
#	Wilayah	Desil 1		Desil 2		Desil 3		Desil 4		Desil 5		TOTAL	
		1	Desa BEJARAN	46	88	171	258	202	321	41	162	177	291
2	Desa BUKITREJO	21	36	12	24	18	36	11	22	117	132	463	1,391
3	Desa KALIN	17	28										
4	Desa GAMBAN	11	18										
5	Desa GAMBAN	17	28										
6	Desa GONDONGREJIS	14	24										
7	Desa KIRIJO	10	17										
8	Desa KIRIJO	11	18										
9	Desa KIRIJO	11	18										
10	Desa KIRIJO	11	18										
11	Desa KIRIJO	11	18										
12	Desa KIRIJO	11	18										

Data Periode PBOT 2020 Sem I										
#	ID BKT	Nama Kepala RTS	RT	RW	Desa/Lingkungan	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten	Sektor	Status
2	311200000000000000000000	000000000000000000000000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000	000
3	311200000000000000000000	000000000000000000000000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000	000
4	311200000000000000000000	000000000000000000000000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000	000
5	311200000000000000000000	000000000000000000000000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000	000
6	311200000000000000000000	000000000000000000000000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000	000
7	311200000000000000000000	000000000000000000000000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000	000
8	311200000000000000000000	000000000000000000000000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000	000

**c. Fitur Kebutuhan Rumah Tangga Sasaran (RTS)**

Fitur ini menampilkan indikator dan sub indikator masalah yang terjadi di setiap rumah tangga miskin setiap periode pendataan. Fitur ini dibuat agar memudahkan setiap Organisasi Perangkat daerah bisa terlibat dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sesuai dengan tupoksi tiap OPD. Dari berbagai macam indikator dan sub indikator di dalam aplikasi, bila kita kaitkan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD maka setiap dinas akan memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan indikator kemiskinan tersebut.

Selain agrerat masalah yang ditampilkan, data juga menampilkan by name by address. Sehingga dengan fitur ini akan mempercepat OPD dalam menentukan kelompok sasaran berdasarkan IKU OPD.

#	Indikator / Opsi	Data			
		PBDT 2019 Smt II	PBDT 2019 Smt I	PBDT 2018 Smt I	PBDT 2017
5	Status Tempat Tinggal Rumah Tangga				
0	Tidak Terlata	0	1,085	2,557	0
1	Milik Sendiri	0	79,028	78,603	0
2	Kotrak/sewa	0	622	667	0
3	Bebas sewa				
4	Dinas				

**Data RTS Berbasis Indikator: Status Lahan Tempat Tinggal = Tanah negara**

Excel CSV PDF Print Column visibility Cari:

#	lainnya	#	ID BDT	Nama Kepala RTS	Alamat
6	Status Lahan Tempat Tinggal	1	3313010003000288	WAGIMAN	DUSUN KENDAL KIDUL RT 33 RW 14
1	Milik sendiri	2	3313010003000101	LASIYEM	DUSUN SANGEN RT 01 RW 01
2	Milik orang lain	3	3313010003000247	ANA MINTARSIH	DUSUN SANGEN RT 04 RW 02
3	Tanah negara	4	3313010003000233	JIKEM	KENDAL LOR RT 25 RW 10
4	Lainnya	5	3313010003000243	LATIF NURHARYANTO	MONGSARI RT 15 RW 06
7	Luas Lantai Rumah	6	3313010003000076	TOJOREJO	SANGEN RT.07 RW.03
8	Asis Lantai Terluas	7	3313010004000230	KANIYEM	KERON RT 24 RW 09
		8	3313010005000230	SIJWARSI	DUSUN KI LUMPIT RT 01 RW 01

**d. Fitur Kebutuhan Anggota Rumah Tangga (ART)**

Fitur ini menampilkan indikator dan sub indikator masalah yang terjadi di setiap Anggota Rumah Tangga (ART) dari Rumah Tangga Sasaran (RTS) miskin setiap periode pendataan. Fitur ini dibuat agar memudahkan setiap Organisasi Perangkat daerah bisa terlibat dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sesuai dengan tupoksi tiap OPD. Dari berbagai macam indikator dan sub indikator di dalam aplikasi, bila kita kaitkan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD maka setiap dinas akan memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan indikator kemiskinan setiap individu miskin tersebut.

Selain agrerat masalah yang ditampilkan, data juga menampilkan by name by address. Sehingga dengan fitur ini akan mempercepat OPD dalam menentukan kelompok sasaran berdasarkan IKU OPD.

#	Indikator / Opsi	Data		
		PBDT 2019 Smt II	PBDT 2019 Smt I	PBDT 2018 Smt I
9	JENIS CACAT			
0	Tidak cacat	0	302,570	380,262
1	Tuna daksa/cacat tubuh	0	1,460	1,843
10	Cacat mental retardasi	0	1,266	1,594
11	Mantan penderita gangguan jiwa	0	464	599
12	Cacat fisik & mental	0	583	794
2	Tuna netra/buta	0	498	671
3	Tuna rungu	0	459	664
4	Tuna wicara	0	244	323
5	Tuna rungu & wicara	0	241	299
6	Tuna netra & cacat tubuh	0	93	130
7	Tuna netra, rungu, & wicara	0	45	67
8	Tuna rungu, wicara & cacat tubuh	0	94	147
9	Tuna rungu, wicara, netra & cacat tubuh	0	88	127
10	PENYAKIT KRONIS/MENAJIRIN			
0	Tidak ada	0	298,570	374,411
1	Hipoertensi (tekanan darah tinggi)	0	2.363	2.981

**e. Query Data RTS**

Fitur ini untuk memudahkan setiap Organisasi Perangkat daerah (OPD) dalam menganalisa data Rumah tangga sasaran (RTS), menggabungkan lebih dari satu indikator untuk meelacak warga miskin yang memenuhi syarat menerima layanan jaminan berdasarkan parameter yang telah ditetapkan. Misalnya : Yang berhak mendapatkan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan kriteria 1) Tanah milik sendiri, 2) Dinding anyaman bambu, 3) Lantai tanah. Data yang akan muncul, kalau ke 3 syarat yang ditetapkan terpenuhi dari keluarga miskin tersebut.

The interface consists of several filter panels on the left and a main data table on the right. The filters are:

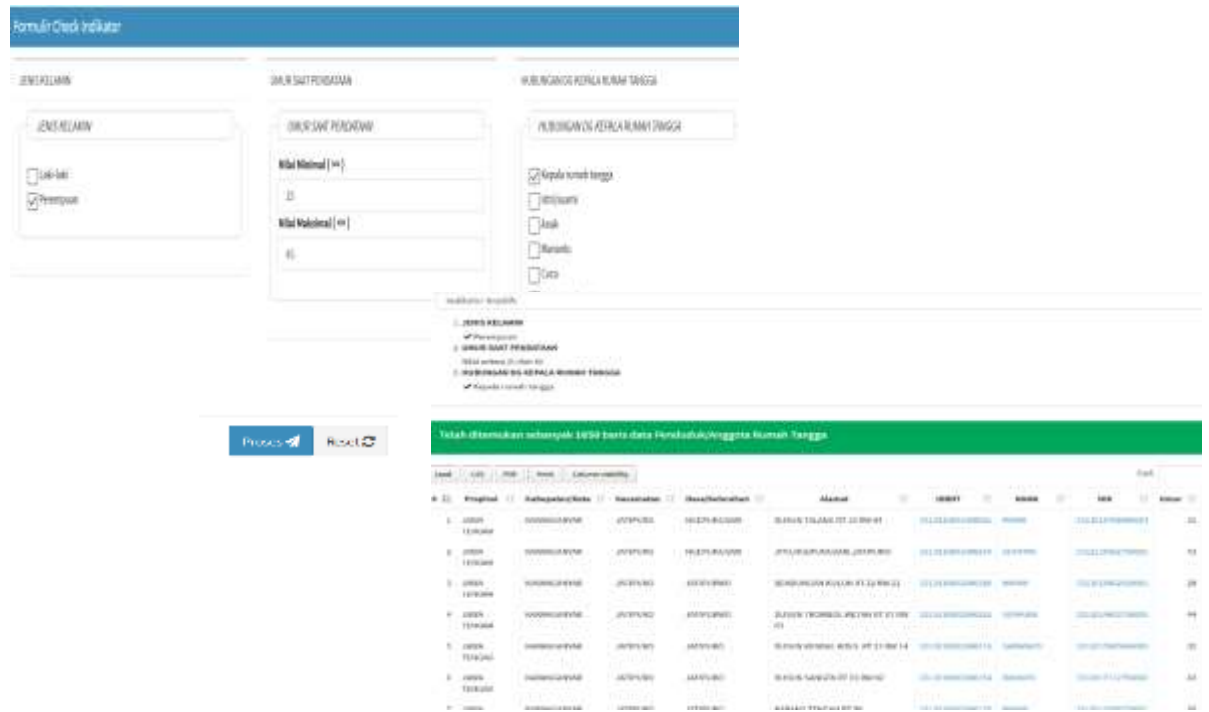
- Status Tempat Tinggal Rumah Tangga:** Includes options like Tidak Tertata, Milik Sendiri, Kotrak/sewa, Bebas sewa, Dinas, and Lainnya.
- Status Lahan Tempat Tinggal:** Includes options like Milik sendiri, Milik orang lain, Tanah negara, and Lainnya.
- Jenis Lantai Terluas:** Includes options like Marmer/granit, Lainnya, Karanda, Padiet/vinil/permadani, Ubin/tegel/teraso, Kayu/japan kualitas tinggi, Semen bata merah, bambu, Kayu/japan kualitas rendah, and Tanah.
- Jenis Dinding Terluas:** Includes options like Tembok, Plesteran anyam, Kayu, Anyaman bambu, Batang kayu, Bantol, and Lainnya.

The main data table is titled "Data Berbasis Indikator" and shows a list of filtered data. A green banner above the table states: "Telah ditemukan Data sebanyak 145 Rumah Tangga Sasaran". The table columns include: No, Prinsipal, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Alamat, IDRT, and Nama Kepala Rumah Tangga. The table contains 7 rows of data.

No	Prinsipal	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Alamat	IDRT	Nama Kepala Rumah Tangga
1	JANI TEGAH	KABUPATEN	JUPUR	KEDUNGUR	OLAH LUDAH RT 004/01	011000000040	SABIT
2	JANI TEGAH	KABUPATEN	JUPUR	JUPUR	SELO RT 004/01	011000000004	ABDI
3	JANI TEGAH	KABUPATEN	JUPUR	JUPUR	JUNDA RT 004/01	011000000005	SUPRI
4	JANI TEGAH	KABUPATEN	JUPUR	JUPUR	OLAH LANGIT RT 004/01	011000000001	RIKAS GEMILAH
5	JANI TEGAH	KABUPATEN	JUPUR	JUPUR	KEBUNGUR RT 004/01	011000000001	ABDI
6	JANI TEGAH	KABUPATEN	JUPUR	JUPUR	KEBUNGUR RT 004/01	011000000001	ABDI
7	JANI TEGAH	KABUPATEN	JUPUR	JUPUR	OLAH LANGIT RT 004/01	011000000001	SABIT

**f. Query Data Anggota Rumah Tangga (ART)**

Fitur ini untuk memudahkan setiap Organisasi Perangkat daerah (OPD) dalam menganalisa data dari setiap individu/anggota rumah tangga (art), menggabungkan lebih dari satu indikator untuk melacak warga miskin yang memenuhi syarat menerima layanan jaminan berdasarkan parameter yang telah ditetapkan. Misalnya : OPD dinas KB dan pemberdayaan membutuhkan data : Kepala Rumah tangga perempuan (Janda atau belum menikah), umur 25-45 (produktif)



**3. Sistem Informasi Desa (SID)**

Aplikasi sistem Informasi Kesejahteraan (SIK) sedianya akan diintegrasikan dengan SID, sehingga aplikasi SIK menjadi fitur tambahan di dalam SID. Tetapi karena belum ada kepastian SID yang digunakan desa, maka SIK di tingkat desa masih berdiri sendiri. Tetapi aplikasi di desa bisa berjalan dengan baik, dimana proses input data bisa dilakukan di setiap desa dan data desa bisa ditarik ke supra kabupaten.

**REKOMENDASI**  
**PENGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN (SIK)**  
**SEBAGAI BASE LINE PERENCAAN SETIAP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)**  
**SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN MANAJEMEN KERUYOKAN**  
**UNTUK PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

1. Aplikasi akan memudahkan distribusi data dan menginformasikan tentang persoalan dan kebutuhan warga miskin baik pada Organisasi Perangkat daerah (OPD), Pemerintah Desa, dengan membangun hak akses masing-masing OPD maupun desa. Keterbukaan informasi juga memungkinkan data ini diakses oleh masyarakat umum, hanya pada batas jumlah data agregat tanpa bisa akses by name by address.
2. Karena ketersediaan data saat ini bersumber dari Data Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari kementerian sosial, maka data ini bisa menjadi sebagai basis rujukan awal perencanaan setiap OPD berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD dikaitkan dengan indikator kemiskinan. Meskipun diduga data DTKS masih belum valid dengan kondisi kesejahteraan di tingkat masyarakat, berdasarkan uji coba di 5 desa.
3. Aplikasi ini akan lebih sempurna, apabila dilengkapi dengan rumus kategorisasi kesejahteraan. Pemerintah Kabupaten Karanganyar bisa menyusun kategorisasi lokal, hal ini dikarenakan pemerintah nasional belum mau memberikan rumus kategorisasi yang selama ini digunakan. Rumus kategorisasi menjadi penting untuk melihat progres dari a) Setiap Intervensi yang dijalankan, akan merubah indikator dari kelompok miskin dan terjadi pergeseran tingkat kesejahteraan (Data Bisa Real Time), b) Sebagai acuan Dinas Sosial untuk mengetahui DTKS yang harusnya sudah keluar dari data kemiskinan, c) Sebagai acuan Dinas Sosial atas Data Lokal yang layak untuk diajukan sebagai Data DTKS ke Kemensos.
4. Bisa ditambahkan dengan rumus bidang OPD, misalnya rumus kategorisasi kesejahteraan dari sisi rumah. Dengan rumus tertentu kita bisa menyusun data ini berdasarkan rangking dari tingkat keparahan rumah warga miskin.
5. Perlu ditambahkan fitur penerima layanan jaminan sosial baik dari APBN, APBD Propinsi, dan APBD Kabupaten agar tidak terjadi dobel penerima layanan.
6. Dispermasdes Kabupaten mengembangkan Sistem Informasi Desa (SID), diharapkan fitur SIK di tingkat desa bisa menjadi salah satu fitur SID.

7. Aplikasi ini bisa menjadi rujukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Karanganyar sebagai bahan untuk melakukan koordinasi, sinergitas dan pengendalian program di dalam rapat-rapat koordinasi.
8. TKPKD perlu melakukan uji coba percepatan Penanggulangan kemiskinan dengan pola manajemen keroyokan baik OPD, Desa maupun CSR Swasta pada beberapa desa. Dengan kekuatan aplikasi ini akan mudah untuk melakukan distribusi tanggung jawab dan mampu monitoring pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan. Diharapkan dengan pola kerja ini akan mampu meningkatkan kualitas rapat-rapat koordinasi yang dijalankan di TKPKD sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskin agar tepat sasaran dan tepat program.
9. Setiap OPD dan Desa perlu dilakukan pelatihan dalam penggunaan aplikasi khususnya dalam membaca data dan menganalisa data dan kemudian mampu dijadikan sebagai bahan perencanaan pembangunan yang pro poor.
10. Setiap OPD perlu diidentifikasi antara Indikator kinerja utama (IKU) dengan indikator kemiskinan yang tersedia yang akan menjadi tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi). Aplikasi masih mungkin ditambahkan indikator-indikator tambahan yang dibutuhkan setiap OPD.



**Hasil 3 :**

**Pengembangan Aplikasi Android untuk  
verifikasi Indikator kemiskinan yang  
terintegrasi dengan Sistem Informasi  
Kesejahteraan (SIK) dan Sistem Informasi  
Desa (SID)**

### C. Pengembangan Aplikasi Android untuk verifikasi Indikator kemiskinan

Proses pendataan warga miskin dengan berbagai indikator dan sub indikator baik untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan Anggota Rumah Tangga (ART) yang jumlahnya cukup banyak, selama ini menggunakan blangko kertas dalam proses pencacahannya. Masih diperlukan input ulang atas hasil pencatatan indikator ke dalam aplikasi. Pola verifikasi indikator kemiskinan dengan berbasis kertas, akan memakan biaya yang cukup besar dan waktu yang lebih panjang.

Untuk mempermudah proses verifikasi, yayasan JALATERA menginisiasi pembuatan aplikasi berbasis android yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesejahteraan (SIK) yang dibuat untuk proses verifikasi indikator kemiskinan. Selain menghemat biaya dan waktu, kekuatan aplikasi android ini juga bisa menampilkan foto setiap indikator dan titik koordinat dari rumah tangga sasaran (RTS). Adapun mekanisme kerja dan tampilan dari aplikasi android adalah sebagai berikut :

#### 1. Pengunduhan Aplikasi Android

Aplikasi jersus (JALATERA Sensus) adalah aplikasi yang dikembangkan untuk melakukan pendataan warga miskin berbasis aplikasi android. Aplikasi jersus sendiri dikembangkan menyesuaikan formulir isian DTKS yang berbasis kertas yang dikembangkan agar dapat diinput dengan perangkat android, untuk mendapatkan aplikasi jersus bisa download di <https://s.id/JALATERA-13>

#### 2. Tampilan login jersus



(gambar 1.1 halaman login jersus)

Halaman login ini muncul pertama kali ketika aplikasi selesai di instal, untuk mengakses dan bisa menggunakan aplikasi silakan masukkan user dan pasword yang telah di daftar lewat dashboard e-sik kabupaten

### 3. Halaman utama aplikasi jersus



(gambar 1.2 halaman utama aplikasi jersus)

Pada halaman utama jersus terdapat menu menu utama yaitu ;

#### a. Sinkronisasi

Pada menu ini digunakan untuk mengambil data dan mengirim data di server jersus agar memperbaharui data responden yang di server dan di perangkat android yaitu data responden RT ART dan indikator RT dan ART

#### b. Wilayah

Pada menu ini berisi tentang daftar data responden yang bisa di pilih sesuai dengan wilayah yang mempermudah dalam pencarian data responden

c. **Menu utama** (pojok kanan atas)



(gambar 1.2.c daftar menu utama)

Pada menu ini memiliki sub menu yaitu :

- **Home** : halaman utama aplikasi jersus
- **Profil** : informasi pengguna aplikasi jersus atau user login aplikasi jersus
- **Responden** : daftar responden (sama seperti menu wilayah)

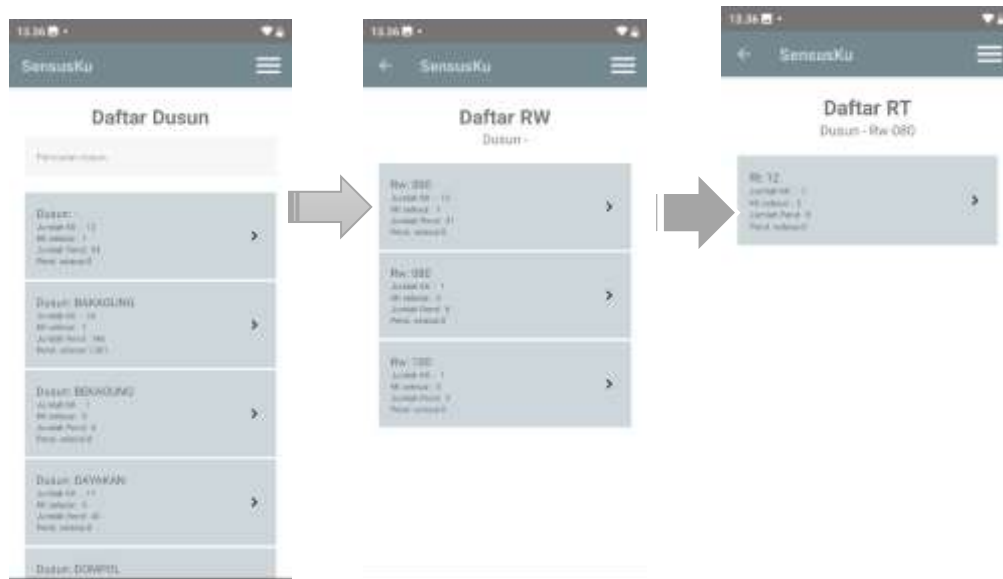
4. **Halaman sinkronisasi**



(gambar 1.3 halaman sinkronisasi)

Pada halaman proses sinkronisasi data dari perangkat keserver dan mengupdate data yang baru.

## 5. Halaman menu wilayah



(gambar 4.1 halaman menu wilayah dusun rw rt)

Pada halaman ini berisis data respondeng yang yang di pisah berdasarkan wilayah dusun Rukun warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT)

## 6. Masuk pada menu responding

Pada halaman responding berisi :

a. Daftar Kepala Rumah Tangga =



b. Daftar Anggora Rumah Tangga =



Tampilan menu responding akan menampilkan setiap Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang sudah terdaftar di sistem informasi Kesejahteraan, dan dibawahnya adalah responden dari anggota Rumah Tangga (ART) dari Kepala Keluarga secara berurutan.



*(gambar 1.5 daftar kk dan art responding)*

Untuk mengisi data responding pilih kk untuk mengisi form responden kepala rumah tangga dan pilih nama anggota rumah tangga untuk mengisi form responden anggota rumah tangga

**7. Form responden kepala keluarga (kk)**

Pada form ini berisi kuisisioner yang formatnya sama dengan form kuisisioner DTKS

**8. Form responden anggota rumah tangga (art)**

Pada form ini berisi kuisisioner yang formatnya sama dengan form kuisisioner DTKS

## REKOMENDASI

### PENGUNAAN APLIKASI ANDROID UNTUK VERIFIKASI INDIKATOR KEMISKINAN YANG TERINTEGRASI DENGAN SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN (SIK)

1. Aplikasi android untuk verifikasi data kemiskinan layak untuk dikembangkan karena akan terjadi penghematan biaya dan waktu dalam implementasinya.
2. Aplikasi ini juga bisa bekerja dalam kondisi tanpa ada jaringan internet (Blanch spot) dengan bekerja secara off line, dan ketika ada internet data-data akan dipindah ke Sistem Informasi Kesejahteraan (SIK)
3. Aplikasi ini juga dilengkapi foto untuk setiap indikator, sehingga bisa mengurangi kecurangan data yang dilakukan di lapangan. Untuk foto perlu dibangun kesepakatan di tingkat Kabupaten, indikator apa saja yang harus difoto dan tampil di dalam SIK. Semakin banyak foto yang dibutuhkan, maka dibutuhkan server yang besar juga di tingkat SIK kabupaten.
4. Aplikasi ini dilengkapi dengan titik koordinat dari rumah tangga sasaran (RTS), sehingga akan mudah melacak keberadaan rumah warga miskin.
5. Untuk integrasi dengan Sistem Admisnitrasi Kependudukan (SIK), aplikasi ini di desain untuk tidak terjadi sinkronisasi. Tetapi sinkronisasi akan dijalankan oleh aplikasi SIK.

**Hasil 4 :**

**Metodologi Participatory Poverty  
Assesment (PPA) berbasis spasial untuk  
Penyusunan RPJMDES**



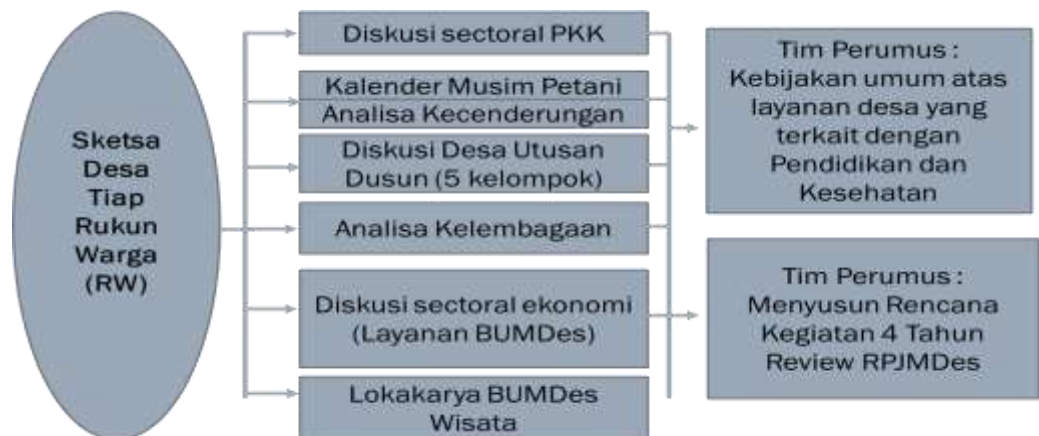
**D. Metodologi Participatory Poverty Assesment (PPA) berbasis spasial untuk Penyusunan RPJMDES**

Kebijakan implementasi UU No. 6 tahun 2014 tentang desa atas penggunaan Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) masih belum optimal penggunaannya dari sisi pro poor, pro growth dan pro job, hal ini ditandai dengan pembangunan desa masih terkonsentrasi pada pembangunan fisik khususnya jalan, drainase dan gapura. Tidak adanya atau tidak digunakannya metodologi dalam melakukan pemetaan masalah dan potensi masyarakat dalam penyusunan RPJMDES menjadi salah satu faktor Dana Desa tidak mampu menjadi daya ungkit percepatan penanggulangan kemiskinan. Untuk membangun sebuah perencanaan yang baik, Yayasan JERMI melakukan uji coba di 1 desa pendem Kecamatan Mojogedang.

Participatory Poverty Assessment (PPA) berbasis spasial didefinisikan sebagai sebuah instrumen untuk memasukkan pandangan masyarakat ke dalam analisis masalah dan formulasi strategi untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kebijakan desa. PPA dapat menguatkan proses pengkajian terhadap masalah masyarakat melalui: meluaskan keterlibatan stake holder yang akan meningkatkan dukungan dan legitimasi terhadap strategi pembangunan desa serta penganggaran yang pro poor, pro growth dan pro job.

Dalam proses penyusunan RPJMDES selain pemetaan berbasis spasial juga digunakan data-data kemiskinan dalam proses pengkajiannya. Sehingga diharapkan penggunaan Dana Desa juga akan mengarah pada persoalan warga miskin, baik Rumah Tangga sasaran maupun Anggota Rumah Tangga (ART) miskin.

Adapun Tahap kegiatan PPA berbasis spasial dan teknik-teknik yang digunakan adalah sebagai berikut :



- **Teknik Sketsa Dusun**

Dalam pengkajian keadaan Desa di tingkat dusun alat analisis yang digunakan adalah Sketsa Desa untuk mengetahui masalah dan potensi serta mengukur dampak yang terjadi atas masalah. Masyarakat melakukan analisa secara partisipatif, dengan bantuan peta dusun untuk melakukan penandaan dimana masalah tersebut terjadi ke dalam peta. Peserta yang terlibat dalam pembahasan sketsa dusun adalah utusan masing-masing RT dan RW dan dibagi ke dalam 5 (lima) kelompok isu yaitu: Kesehatan, Infrastruktur, Pendidikan, Ekonomi dan Rural atau perdesaan (KIPER).

- **Analisa hubungan Sebab-akibat masalah di tingkat desa**

Hasil rumusan tiap dusun, kemudian dirangkai menjadi peta masalah dan potensi di tingkat Desa. Utusan masing-masing dusun dan utusan per isu melakukan analisa apakah masalah antara dusun satu dengan dusun yang lain saling berkaitan atau tidak (merunut masalah). Dari hasil analisa ini muncul daftar skala prioritas (DSP) di masing-masing isu.

- **Teknik Kalender Musim**

Teknik kalender musim digunakan untuk petani, dengan pertimbangan mayoritas masyarakat desa pendem berprofesi sebagai petani. Dengan teknik ini peserta mampu menganalisa pada saat bulan apa saja masyarakat mengalami sengsara karena tidak adanya penghasilan serta pada bulan apa saja masyarakat dalam situasi sejahtera. Faktor yang menghambat dalam berproses dalam budidaya pertanian, menjadi temuan baru dalam menyusun rencana kegiatan untuk penyelesaian masalah.

- **Teknik Analisa kecenderungan**

Teknik analisa kecenderungan untuk mengukur setiap kejadian besar yang ditemukan dalam sketsa desa dan masyarakat diminta menganalisa kondisi 5 tahun sebelumnya dan prediksi yang akan terjadi 5 tahun mendatang. Dengan teknik ini, masyarakat mampu memprediksikan gambaran dan situasi desa baik masalah maupun potensi desa 5 tahun mendatang bila masalah atau potensi itu tidak digarap dengan baik.

- **Teknik Diagram Venn (Analisa Kelembagaan)**

Teknik ini digunakan untuk menggambarkan pola relasi antara kelembagaan formal maupun informal desa dengan pemerintah desa. Dengan teknik ini, setiap perwakilan organisasi mampu memberikan rekomendasi bagaimana strategi komunikasi dan koordinasi yang akan dijalankan ke depan sebagai upaya perbaikan relasi hubungan. Selain itu dengan teknik ini mampu memetakan potensi dan masalah yang terjadi di setiap lembaga dan mampu menghasilkan kebutuhan perencanaan kegiatan yang harus dianggarkan oleh desa.

- **Teknik Diskusi sektoral**

Diskusi sektoral lebih banyak melibatkan kelompok perempuan dan kepala rumah tangga perempuan miskin. Kajian ini mampu menganalisa masalah dan potensi perempuan dalam mendukung ekonomi keluarga. Dari hasil diskusi sektoral mampu merumuskan kegiatan-kegiatan yang akan menjadi rintisan kegiatan bersama khususnya di kelompok perempuan di masing-masing dusun.

- **Lokakarya BUMDES**

Lokakarya BUMDES dimaksudkan untuk menyusun kerangka konsep unit usaha, berdasarkan temuan hasil PPA berbasis spasial di tingkat desa. Hal ini menyangkut juga dengan penyertaan modal dari Dana Desa yang akan dikelola oleh BUMDES. Analisis dengan melibatkan pengelola BUMDES terkait dengan kesiapan melayani masalah-masalah yang dihadapi masyarakat khususnya berkaitan dengan rencana wisata, kredit alat dan kredit peternakan.

- **Teknik Transect Lapangan**

Teknik ini dilakukan oleh tim perumus dokumen RPJMDES dengan melihat secara langsung ke lapangan baik masalah dan potensi sekaligus melakukan perkiraan kebutuhan biaya. Hal ini untuk mempermudah kerja tim perumus dalam mencocokkan prioritas versi masyarakat berdasarkan tingkat kemendesakan sekaligus untuk mempermudah dalam menyusun alokasi anggaran.

- **Perumusan Hasil**

Tim perumus berdasarkan berbagai temuan dan hasil PPA berbasis spasial, kemudian menyusun prioritas berdasarkan Issu sekaligus menyusun anggaran penggunaan dana Desa dari tahun I sampai dengan tahun ke 6. Dengan pola penulisan dokumen anggaran seperti ini akan mempermudah desa maupun dusun ke depannya dalam proses penyelenggaraan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDES) tiap tahunnya.

- **Musdes dan Musrenbangdesa**

Hasil rumusan tim perumus dikembalikan lagi kemasyarakat melalui musdes, beberapa catatan perubahan masukan peserta musdes dirumuskan ulang oleh tim perumus. Hasil perubahan dokumen selesai dilakukan musrenbangdes sebagai forum tertinggi untuk pengesahan dokumen RPJMDES.

**REKOMENDASI**  
**PENGGUNAAN METODOLOGI PARTICIPATORY POVERTY ASSESEMENT (PPA)**  
**BERBASIS SPASIAL UNTUK MENYUSUN DOKUMEN**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES)**

1. Dengan model kajian PPA berbasis spasial yang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh stake holder pembangunan desa, mampu merubah cara berpikir masyarakat dari semula lebih mengedepankan aspek keindahan desa dengan membangun jalan, drainase dan gapura mengarah untuk penyelesaian masalah yang bisa menjadi faktor penyebab kemiskinan.
2. Dengan metodologi PPA berbasis spasial desa akan mampu memproyeksikan perubahan yang ingin dicapai oleh desa khususnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Proporsional penggunaan dana desa sudah mulai berimbang antara isu kesehatan, infrastruktur, pendidikan, ekonomi dan pengelolaan asset Desa.
4. Kajian kemiskinan yang dijalankan mampu menempatkan alokasi anggaran untuk warga miskin baik itu penambahan gizi pada balita miskin diluar PMT, Bantuan anak sekolah dari keluarga miskin, mendorong anggaran pemberdayaan pada kelompok defable serta perempuan dan lain sebagainya.
5. Penyertaan anggaran ke BUMDES untuk menjalankan jenis usaha yang akan dijalankan sudah berbais kebutuhan masyarakat.
6. Selain itu hasil PPA akan mampu mendorong jenis bisnis desa yang akan di rancang oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam melayani kebutuhan masyarakat sekaligus mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)
7. Komposisi penggunaan anggaran Dana Desa sudah mulai tampak mengarah pada penganggaran yang pro poor, pro growth dan pro job.
8. PPA berbasis spasial layak dikembangkan sebagai metodologi perencanaan pembangunan di desa, dimana dokumen RPJMDES mampu menekan kemungkinan munculnya warga miskin baru akibat dari persoalan spasial.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN LAPORAN KEGIATAN :**

1. Panduan untuk perubahan indikator kemiskinan dan memasukkan daftar usulan baru warga miskin ke dalam Sistem Informasi Kesejahteraan di : <https://sidanangkis.karanganyarkab.go.id/>
2. Satu buah Flasdik yang berisi Script aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan, yang berisi : ***(Tidak digandakan khusus untuk diskominfo)***
  - Script aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan
  - Script aplikasi android untuk verifikasi warga miskin
  - Script dashboard supra kabupaten untuk mewadahi Sistem informasi Desa (SID) berdasarkan aplikasi dari SIDEKA-BP2DK Jakarta.
3. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Desa Pendem, Kecamatan Mojogedang. ***(Tidak digandakan khusus untuk Dispermasdes)***
4. Serah Terima Kegiatan Kerjasama dari Yayasan JALATERA dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
5. Foto-Foto Kegiatan